

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara adalah pembangunan. Menurut (Todaro & Smith, 2011) Pembangunan adalah proses yang bersifat multidimensional, meliputi berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional, serta berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat meningkat adalah tujuan utama dari pembangunan. Terdapat korelasi yang erat antara pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, karena ketika pembangunan berjalan dengan baik, ini menciptakan kondisi yang kondusif untuk bisnis dan industri berkembang, sehingga ekonomi bertumbuh.

Percepatan pembangunan daerah dapat dicapai melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas wilayah. Agar kegiatan ekonomi berjalan efisien, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam mendorong potensi daerah secara berkelanjutan Miartha, et. al (2024). Ketika potensi daerah berkembang, akan terjadi pertukaran yang saling menguntungkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Hal ini akan menggerakkan roda perekonomian daerah sesuai karakteristiknya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang wajib direncanakan dalam suatu daerah atau perkotaan. Pembangunan memerlukan pendekatan yang selaras dengan perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk melahirkan pemerataan pembangunan. Pembangunan wajib dirasakan oleh semua kalangan masyarakat (Tuti, 2020).

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan konektivitas antarwilayah, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung sektor-sektor seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, tetapi juga mendorong sektor lainnya seperti industri, perdagangan, dan jasa, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses pasar, menurunkan biaya distribusi, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong investasi swasta (Mankiw, 2014).

Simon Kuznets dalam Rossani & Setyowati, (2022) pembangunan merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*), artinya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Hal ini karena infrastruktur merupakan fasilitas publik yang bersifat mendasar dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Ketersediaan infrastruktur tidak hanya mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Selain itu, infrastruktur menjadi syarat utama agar sistem perekonomian dapat berjalan secara optimal.

Pembangunan infrastruktur sangat terkait erat dengan kemajuan ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur memiliki posisi krusial dalam mendorong aktivitas

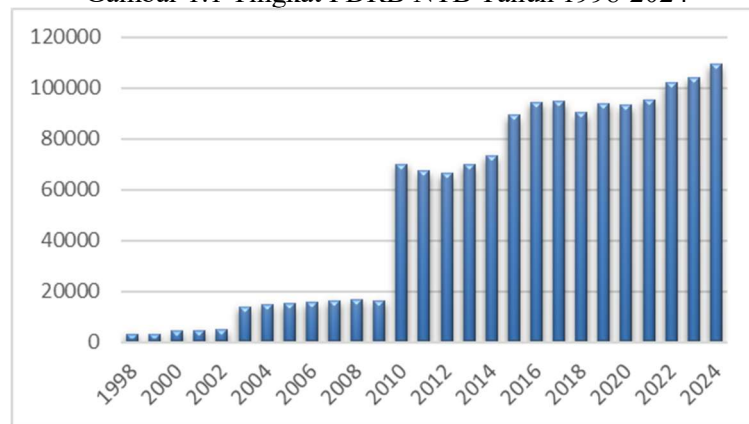
ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang kuat dapat menciptakan ekonomi yang lebih stabil, menyediakan lapangan kerja, dan membangun iklim yang menarik bagi investor (Unruh et al., 2019). Oleh karena itu, infrastruktur dianggap sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi. Selain dapat menggerakkan roda ekonomi, infrastruktur juga mampu meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kedua aspek ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Lestari & Suropto, 2019).

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah adalah peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat wilayah. PDB mencerminkan keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh pelaku usaha dalam suatu negara, yakni total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu periode tertentu (Mankiw, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), daerah dengan infrastruktur yang lebih maju cenderung memiliki PDRB yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur memainkan peran strategis sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa dukungan infrastruktur yang cukup, suatu negara akan mengalami kesulitan dalam mencapai potensi maksimal pertumbuhannya (Todaro & Smith, 2020;).

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang secara geografis berada di kawasan rawan bencana alam. Dalam dua dekade terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami berbagai bencana besar, seperti gempa bumi dahsyat pada tahun 2018 yang melanda Lombok dan Sumbawa. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, dan fasilitas listrik, serta menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari Rp 12 triliun (BNPB, 2018). Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur.

Gambar 1.1 Tingkat PDRB NTB Tahun 1998-2024

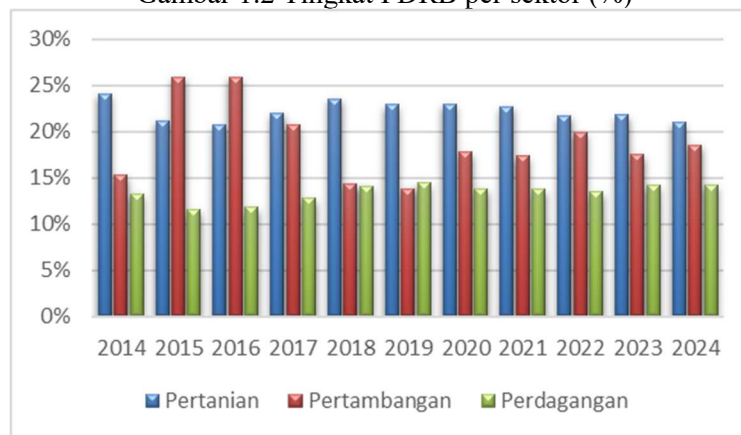


Sumber: BPS NTB diolah, 2025

Pertumbuhan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 1998–2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Kenaikan ini tidak lepas dari berbagai faktor internal daerah, salah satunya adalah peningkatan investasi pada sektor infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik. Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, sebagaimana dikemukakan oleh Romer (1990), pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga dapat dijelaskan oleh proses-proses internal seperti akumulasi modal fisik dan peningkatan produktivitas melalui infrastruktur.

Infrastruktur yang memadai berperan dalam menurunkan biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, tren kenaikan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lebih dari dua dekade tersebut memberikan dasar yang kuat untuk menelaah secara lebih dalam sejauh mana infrastruktur berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 1.2 Tingkat PDRB per sektor (%)



Sumber: BPS NTB diolah, 2025

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang stabil, yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi berperan penting dalam menjaga produktivitas dan distribusi hasil tani; hal ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2020) bahwa infrastruktur desa mampu memperluas akses pasar bagi petani. Sektor pertambangan memperlihatkan fluktuasi tajam, terutama saat infrastruktur energi dan transportasi meningkat secara signifikan pada periode 2010–2016, mencerminkan peran strategis infrastruktur dalam menunjang kegiatan ekstraktif (Prasetyo, 2021). Adapun sektor perdagangan menunjukkan pertumbuhan bertahap sejak 2010, yang mengindikasikan bahwa perbaikan konektivitas jalan dan logistik memperkuat efisiensi distribusi barang dan jasa serta daya saing ekonomi lokal (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Kerusakan infrastruktur akibat bencana tidak hanya mengganggu aktivitas sosial dan pelayanan publik, tetapi juga menghambat kelancaran proses produksi, distribusi, dan konektivitas antardaerah. Sebagaimana dinyatakan oleh Pelling (2003), kerentanan infrastruktur terhadap bencana alam merupakan hambatan struktural bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah berkembang. Oleh karena itu, pemulihan dan penguatan infrastruktur menjadi prioritas penting dalam strategi pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sejalan dengan teori pertumbuhan endogen Romer (1990), di mana peningkatan modal fisik seperti infrastruktur dapat menjadi sumber utama pertumbuhan jangka panjang melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Penting untuk menyoroti keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dan hubungan sektoral dalam perekonomian daerah. Infrastruktur tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memainkan peran vital dalam dinamika antar sektor ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor utama seperti pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Setiap sektor tersebut memiliki karakteristik input-output yang saling berelasi, di mana infrastruktur menjadi penghubung yang memastikan kelancaran aliran barang, jasa, dan informasi antar sektor (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dapat meningkatkan sinergi sektoral dan memperkuat basis ekonomi daerah.

Fenomena ketimpangan wilayah antara Indonesia bagian barat dan timur masih menjadi tantangan nyata dalam proses pembangunan nasional. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–

2024, pemerintah menargetkan penguatan pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu prioritas strategis nasional. RPJMN menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur di kawasan timur Indonesia ditujukan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas antardaerah, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur di NTB bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan regional, tetapi juga untuk mendukung agenda pemerataan pembangunan nasional.

Dalam RPJMN 2020–2024, tercantum bahwa pembangunan infrastruktur wilayah difokuskan pada penyediaan jalan nasional, sistem penyediaan air minum (SPAM), serta elektrifikasi desa yang belum terjangkau jaringan listrik nasional. Hal ini selaras dengan kebutuhan dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih menghadapi tantangan dalam hal distribusi listrik merata dan akses air bersih yang terbatas di beberapa wilayah pedalaman. Pemerintah pusat juga menetapkan bahwa peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar menjadi landasan untuk mendorong produktivitas sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan di kawasan Nusa Tenggara (Bappenas, 2020).

Secara sektoral, infrastruktur memberikan kontribusi yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik masing-masing sektor. Dalam sektor pertanian, jalan dan irigasi sangat menentukan kelancaran distribusi hasil tani dan efisiensi produksi. Dalam sektor pertambangan, ketersediaan listrik dan jalan akses merupakan prasyarat utama kegiatan ekstraksi dan pengangkutan hasil tambang. Sementara itu, sektor perdagangan sangat tergantung pada kelancaran transportasi, logistik, dan sistem energi yang stabil. Oleh sebab itu, penelitian ini juga penting

untuk mengkaji bagaimana infrastruktur memberikan pengaruh terhadap sektor-sektor tersebut secara spesifik. Hal ini sejalan dengan pendekatan strukturalis dalam pembangunan, yang memandang interkoneksi sektoral sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Lewis, 1954; Hirschman, 1958).

Pemilihan topik skripsi “**Pengaruh Infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Barat**” dilandasi oleh pentingnya memahami bagaimana dinamika pembangunan infrastruktur, dalam wilayah yang rentan bencana seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur melalui PDRB. Sebagaimana dikemukakan oleh Munnell (1992), infrastruktur publik memiliki peran fundamental dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rentang waktu yang panjang, sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembangunan yang resilien dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Apakah pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat?

3. Apakah pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat?
4. Apakah pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun pada penelitian ini memiliki tujuan, untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah studi dengan periode pengamatan dari tahun 1998 hingga 2024. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh infrastruktur—meliputi jalan, air

bersih, dan listrik—terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, serta PDRB pada sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber resmi dan dianalisis melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi. Cakupan penelitian dibatasi pada aspek makroekonomi, tanpa mengikutsertakan variabel sosial dan lingkungan. Diharapkan, hasil dari studi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pembelajaran dalam menambah ilmu serta wawasan dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Selain itu, dapat dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan serta tambahan informasi guna menentukan langkah kebijakan yang tepat dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui PDRB.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya, akademisi, maupun pihak swasta yang tertarik terhadap studi pembangunan ekonomi daerah berbasis infrastruktur.